

Kemenag Jambi dan Pemrov Jambi Tunggu Kuota Provinsi Jambi Terkait Keberangkatan Jemaah Haji 2022



<https://jambi.tribunnews.com/2022/04/21/kemenag-jambi-dan-pemprov-jambi-tunggu-kuota-provinsi-jambi-terkait-keberangkatan-jemaah-haji-2022>

Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, telah mengumumkan kuota haji untuk Indonesia 2022 ini sebanyak 100.051 dengan 1.901 petugas.

Mengenai kabar ini, Kanwil Kemenag Jambi tengah menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Agama RI mengenai keberangkatan haji ini.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia menjelaskan saat ini belum ditentukan besaran kuota per provinsi itu ada berapa jemaah haji yang berangkat.

"Juknis secara spesifik kami belum terima, kuotanya berapa per provinsi kami juga belum terima," katanya, Kamis (21/4/2022).

Ia menjelaskan biasanya keberangkatan haji dari Indonesia ada sebanyak 210.000 jemaah. "Artinya ini ada pengurangan sebesar hampir 50 persen. Kita doakan supaya tahun ini betul berangkat sebagaimana mestinya," ujarnya.

Kemudian ia juga menjelaskan, selama penundaan keberangkatan haji selama pandemi Covid-19 proses manajemen haji di Provinsi Jambi terus berjalan.

"Sehingga untuk menghadapi haji saat ini kita sudah sangat siap. Karena tidak ada yang berubah," bebernya.

"Pendaftaran terus berjalan, juga dengan pembinaan jemaah, dan intinya kita siap hadapi keberangkatan haji 2022 ini," tambahnya.

Menurutnya kabar keberangkatan jemaah haji ini, menjadi kado ramadan 2022. "Saya rasa ini kado ramadan kita kali ini. Mungkin kuota tak sebanyak dulu. Karena ini terjadi pengurangan kuota dan ini hak prerogatif dari Arab Saudi," jelasnya.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi juga sudah melakukan persiapan.

Ada pun persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan transportasi bagi jemaah haji dari Jambi ke lokasi keberangkatan haji.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Mukhtamar Hamdi menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 Miliar untuk keberangkatan haji 2022 ini.

"Dari APBD Murni kita siapkan Rp 17 miliar untuk transportasi para jemaah. Sekarang kita menunggu pengumuman dari pusat berapa banyak kuota untuk kita," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. "Kemenag Jambi dan Pemrov Jambi Tunggu Kuota Provinsi Jambi Terkait Keberangkatan Jemaah Haji 2022", <https://jambi.tribunnews.com/2022/04/21/kemenag-jambi-dan-pemprov-jambi-tunggu-kuota-provinsi-jambi-terkait-keberangkatan-jemaah-haji-2022>, Kamis, 21 April 2022 dan;
2. "Pendamping Haji 2022 dari Kemenag Provinsi Jambi akan Diseleksi Pakai Cat", <https://jambi.tribunnews.com/2022/05/11/pendamping-haji-2022-dari-kemenag-provinsi-jambi-akan-diseleksi-pakai-cat>, Rabu, 11 Mei 2022.

Catatan Berita :

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.²

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:³

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 4

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji terdiri dari:

1. Transportasi;
2. Akomodasi; dan
3. Konsumsi.

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit meliputi:⁴

- a. penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara;
- b. penyediaan transportasi; dan
- c. kapasitas kebutuhan transportasi.

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Penyediaan transportasi meliputi:⁶

- a. penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi;
- b. penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi; dan
- c. penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menteri mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit dengan:⁷

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- b. gubernur di tingkat provinsi;
- c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian penyediaan akomodasi haji selama di Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.⁸

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 7

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penyediaan akomodasi di Indonesia meliputi:⁹

- a. penyediaan akomodasi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan
- b. penyediaan akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Penyediaan konsumsi di Indonesia meliputi:¹⁰

- a. penyediaan konsumsi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan
- b. penyediaan konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Catatan Berita

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 8 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)